KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENYUSUNAN EKONOMI SYARIAH: INTEGRASI NILAI-NILAI LOKAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Zulqarnain¹, Tessya Yunita Siregar², Revan Gunawan³, Muhammad Ramadhani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email : zulqarnain.fsy@uinjambi.ac.id¹, siregartessya@gmail.com², revangunawan10@gmail.com³, dhanikayangan@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran kearifan lokal dalam proses penyusunan kebijakan ekonomi syariah, dengan menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai lokal sebagai upaya menciptakan kebijakan yang relevan, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Beberapa nilai lokal yang menjadi fokus kajian meliputi gotong royong sebagai cerminan solidaritas sosial, musyawarah sebagai wujud keadilan partisipatif, serta harmoni antara adat dan syariat sebagai upaya sinergi antara tradisi dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tersebut memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Namun, implementasi kebijakan ekonomi syariah di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal secara optimal. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi dalam proses integrasi ini meliputi kurangnya pemahaman terhadap potensi kearifan lokal, minimnya dokumentasi sistematis yang memadai, serta pengaruh globalisasi yang mengurangi keberlanjutan tradisi lokal dalam masyarakat. Mengatasi berbagai tantangan tersebut, penelitian ini mengusulkan model integrasi yang mencakup beberapa langkah strategis. Langkah pertama adalah identifikasi dan pendokumentasian nilai-nilai lokal yang relevan. Tahap ini diikuti oleh harmonisasi nilai-nilai tersebut dengan prinsip-prinsip syariah melalui dialog antara ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat. Tahap terakhir adalah penerapan kebijakan berbasis lokal yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan relevansi dan keberterimaan kebijakan tersebut. Model ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi kearifan lokal sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi syariah. Peneliti menyimpulkan integrasi kearifan lokal tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan ekonomi syariah di mata masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan lokal. Untuk itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang kontekstual, adaptif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Ekonomi Syariah, Kebijakan Publik, Pembangunan Berkelanjutan, Integrasi Nilai-Nilai Lokal

Abstract

This study aims to examine in depth the role of local wisdom in the process of formulating sharia economic policies, by focusing on the integration of local values as an effort to create

relevant, inclusive, and sustainable policies. This study uses a qualitative approach with literature study and policy analysis methods to identify local wisdom values that are in line with sharia economic principles. Some of the local values that are the focus of the study include mutual cooperation as a reflection of social solidarity, deliberation as a form of participatory justice, and harmony between customs and sharia as a synergy effort between tradition and Islamic law. The results of the study show that these local wisdom values have a strong alignment with the basic principles of sharia economics, such as justice, benefit, and sustainability. However, the implementation of sharia economic policies in Indonesia still shows a gap in accommodating local values optimally. Some of the main obstacles identified in this integration process include a lack of understanding of the potential of local wisdom, a lack of adequate systematic documentation, and the influence of globalization that reduces the sustainability of local traditions in society. Addressing these challenges, this study proposes an integration model that includes several strategic steps. The first step is the identification and documentation of relevant local values. This stage is followed by the harmonization of these values with sharia principles through dialogue between scholars, academics, and community leaders. The final stage is the implementation of local-based policies that involve active community participation to ensure the relevance and acceptability of the policies. This model is expected to be able to optimize the potential of local wisdom as an integral part of sharia economic policy. The researcher concluded that the integration of local wisdom not only strengthens the legitimacy of sharia economic policies in the eyes of the community, but also contributes to more equitable, sustainable, and local needs-based economic development. For this reason, it is necessary to strengthen collaboration between the government, ulama, academics, and the community in formulating policies that are contextual, adaptive, and competitive at the national and global levels.

Keywords: *Local Wisdom, Sharia Economy, Public Policy, Sustainable Development, Integration Of Local Values*

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang pada dasarnya berisi prinsip-prinsip hukum syariah atau islam.¹ Ekonomi syariah bertujuan mempromosikan suatu keadilan, serta keberdayaan suatu masyarakat untuk

kesejahteraan umum dan memastikan semua kegiatan ekonomi dilaksanakan nilai-nilai ekonomi islam. Semakin lama ekonomi islam semakin mendapat perhatian yang dijadikan sebagai alternatif sistem ekonomi yang bukan hanya berlandaskan pada prinsip keadilan namun

¹Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budiarto, E. W. H. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik*

VOSviewer Dan Literature Review. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

juga berpotensi pada perkembangan ekonomi berkelanjutan.

Beberapa prinsip utama ekonomi syariah diantaranya: 1) Dilarang membuat riba/bunga; 2) dilarang melakukan judi; 3) dilarang adanya gharar/ketidakpastian 4) Adanya larangan pengelolaan resiko serta keuangan yang tidak sesuai; 5) Distribusi keadilan social; 5)Aset bersifat produktif sesuai dengan nilai yang nyata; dan 7) Transaksi dilakukan secara adil serta transparan.²

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim sangat berpeluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun, keberhasilan implementasi ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada penerapan prinsip-prinsip syariah secara universal, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Umumnya ekonomi syariah berfokus terhadap beberapa prinsip

diantaranya prinsip etika, keadilan, serta adanya prinsip berkelanjutan pada berbagai aspek dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut melihat ekonomi sebagai suatu integral dari bermacam kehidupan sosial umat islam untuk menghindari adanya ketidakseimbangan umat sosial dan ekonomi yang dapat terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.³ Ada berbagai sektor yang mencakup dalam ekonomi syariah diantaranya ada perbankan, investasi, keuangan, asuransi, perdagangan, dan sektor lainnya. Adapun institusi keuangan juga banyak diantaranya bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, pasar modar syariah dan sektor lainnya. Instrument yang terlibat dan sesuai dalam ekonomi syariah diantaranya ada mudharabah (kemitraan), musharakah (Bersama-bersama), sukuk (obligasi syariah), dan takaful (asuransi syariah).⁴

Sebagai warisan budaya, kearifan lokal mempunyai nilai-nilai luhur yang sangat memiliki peran penting dalam

²Walyoto, F. R. S. (2022). *Optimalisasi Habitren dan Potensi UMKM Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Dusun Hargosari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo: Social Science Studies*, Vol. 2 No. 3 (2022): (issue-May), 240257. <https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/398/195>

³Walyoto, F. R. S. (2022). *Optimalisasi Habitren dan Potensi UMKM Halal dalam*

Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren

⁴ Yafiz, V. C. M. (2022). *Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi*. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 4 No. 11 (2022): Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 52875291. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1804/1655>

membentuk norma dan perilaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan prinsip dasar dari ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Banyak contoh dari tradisi lokal yang ada di Indonesia yang mencerminkan beberapa prinsip seperti gotong royong, dan solidaritas ekonomi yang sejalan dengan konsep syariah seperti zakat, infaq, dan wakaf. Maka dari itu, integritas dari kearifan lokal dalam kebijakan ekonomi syariah bukan hanya dapat meningkatkan relevansi dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, namun juga tetapi memperkaya pendekatan ekonomi syariah secara lebih holistik.

Meskipun demikian, tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kebijakan ekonomi syariah tidak dapat diabaikan. Perbedaan budaya, konteks lokal yang beragam, serta kurangnya pemahaman terhadap potensi nilai-nilai lokal sering kali menjadi hambatan. Di sisi lain, proses globalisasi yang terus berkembang juga berpotensi mengikis eksistensi kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana kearifan lokal dapat diakomodasi dalam kebijakan penyusunan

ekonomi syariah, sehingga tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga memiliki daya saing global.

Adapun judul dari rtikel ini adalah mengeksplorasi peran kearifan lokal dalam penyusunan kebijakan ekonomi syariah, dengan fokus pada identifikasi nilai-nilai lokal yang relevan serta cara-cara untuk mengintegrasikannya ke dalam kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan kontribusi untuk pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur dan analisis kebijakan. Tujuannya untuk memahami secara mendalam bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan penyusunan ekonomi syariah di Indonesia. Ada beberapa tahapan penelitian, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini mendapatkan dari sumber data sekunder yaitu dari kajian literatur, seperti literatur ilmiah, buku, artikel jurnal, laporan kebijakan, dan dokumen resmi pemerintah terkait ekonomi syariah

dan kearifan lokal. Teknik pengumpulan datanya juga didapatkan dari data sekunder dengan cara mempelajari peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah. Selain itu, studi kasus lokal yang relevan juga dikaji untuk memberikan gambaran empiris mengenai praktik integrasi kearifan lokal dalam kebijakan ekonomi.

2. Identifikasi dan Kategorisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Tujuan pada tahap ini yaitu mengidentifikasi akan nilai-nilai yang ada kearifan lokalnya yang relevan dengan prinsip ekonomi syariah. Nilai-nilai tersebut dianalisis dan dikategorikan berdasarkan keterkaitan dengan konsep syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan distribusi yang adil.

3. Analisis Kebijakan

Kebijakan-kebijakan ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia menganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai kearifan lokal telah diakomodasi. Analisis ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi celah atau potensi penguatan integrasi

kearifan lokal dalam kebijakan tersebut.

4. Model Integrasi Kearifan Lokal

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini mengusulkan model integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan ekonomi syariah. Model ini dirancang untuk memperkuat relevansi kebijakan di tingkat lokal sekaligus meningkatkan efektivitas implementasinya.

5. Validasi Konsep

Konsep dan temuan penelitian ini divalidasi melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil analisis literatur, kebijakan, dan studi kasus. Hal ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan hasil penelitian.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi dan tantangan integrasi kearifan lokal dalam penyusunan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia. Peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi sebuah rekomendasi penelitian untuk para pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Relevan dengan Ekonomi Syariah

Kearifan lokal (*local wisdom*) menurut Karo adalah sebuah gagasan yang berisi nilai-nilai dan pandangan masyarakat lokal yang bersifat bijaksana, baik dan penuh kearifan yang tertata serta diikuti oleh setiap anggota masyarakat.⁵

Kearifan lokal menurut Sibarani adalah sebuah kebijakan serta pengetahuan yang murni dan asli dari kehidupan masyarakatnya yang berasal dari leluhur dalam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu nilai kearifan lokal mengandung sebuah ekosistem dalam kehidupan masyarakat yang bisa diperaktekkan, diajarkan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi lainnya dengan tujuan menuntun pola perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap lingkungan.⁶

Salah satu modal utama masyarakat dalam membangun dirinya tanpa harus merusak tatanan sosial dengan lebih adaptif dengan lingkungan dan alam sekitarnya.

Berfungsi sebagai pedoman, pengontrol dan rambu-rambu masyarakat dalam berperilaku di kehidupan baik dengan sesama maupun dengan alam.⁷

Kearifan lokal berfungsi sebagai suatu konservasi pelestarian daya alam yang berguna mengembangkan sumber daya manusianya, serta pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang berisi petuah, sara, pantangan dan kepercayaan.⁸ Selain itu juga berfungsi sebagai filter dari sesuatu yang mengakomodasi budaya luar yang masuk ke dalam serta memberikan arahan dan perkembangan yang terjadi. Kearifan lokal juga merupakan pengetahuan yang menyatu dengan mitos dan tradisi yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Beberapa nilai kearifan lokal di Indonesia memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah diantaranya:

1. Gotong Royong

Tradisi gotong royong adalah suatu praktik kerja sama dalam mencapai tujuan tanpa mengutamakan kepentingan individu. Gotong royong

⁵Hermanto Suaib, Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Social dalam Pemberdayaan Masyarakat, (An Image, 2017), h. 66

⁶ Hermanto Suaib, Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Lokal dan Modal Social...hal.7

⁷ Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini, dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat, (Bandung: Alfabeta, 2015), H. 66

⁸ Adi Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Masyarakat, (Bandung Humaniora, 2000), h.49

ini mempunyai nilai solidaritas sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tradisi kerja sama dalam masyarakat ini juga mencerminkan konsep solidaritas sosial dalam Islam, seperti zakat, infaq, dan wakaf sebagai bentuk solidaritas ekonomi. Gotong royong juga sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong menolong) dalam islam yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.⁹

2. Musyawarah

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif dengan cara berdiskusi dalam mencapai mufakat. Prinsip musyawarah dalam islam juga merupakan proses pengambilan keputusan yang sejalan dengan prinsip syura dalam ekonomi syariah. Mengajukan partisipasi dalam pengambilan keputusan baik dalam konteks bisnis maupun membuat kebijakan ekonomi. Hal tersebut mencerminkan nilai yang berkeadilan

dan transparansi dalam ekonomi syariah.¹⁰

3. Adat Menurun, Syara' Mendaki dan Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah

Prinsip adat Melayu dari Provinsi Jambi dan Minangkabau ini menunjukkan harmoni antara adat dan ajaran Islam, yang relevan untuk membangun kebijakan ekonomi syariah berbasis nilai lokal. Filosofi ini juga menegaskan bahwa adat istiadat harus sejalan dengan ajaran islam dan prinsip syariah, selaras antara norma lokal dan prinsip syariah dengan sistem ekonomi yang adil dan berbasis islam. Hal tersebut bertujuan menciptakan harmoni antara nilai tradisi dan nilai-nilai agama.¹¹

4. Kearifan Agraris

Ada banyak kearifan agraris yang bertradisikan kearifan lokal yang mencerminkan prinsip ekonomi syariah. Seperti Subak di Bali dan Pela Gandong di Maluku. Subak merupakan tradisi lokal di bidang

⁹ Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) Cet. Ke-1

¹⁰ Hasan, Z. (2020). "Kearifan Lokal dalam Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Sumatera Barat." *Jurnal Syariah*.

¹¹ Naim, M. (2020). "Adat Minangkabau dan Relevansinya dengan Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*.

pertanian, Subak di Bali, merupakan sistem irigasi tradisional yang berbasis pada nilai kebersamaan dan keadilan dalam pembagian sumber daya air untuk kepentingan pertanian masyarakat. Subak mencerminkan prinsip keberlanjutan dan distribusi yang adil dalam pengelolaan sumber daya.¹² Pela Gandong merupakan tradisi persaudaraan antar desa yang mengutamakan kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan dalam islam) dan *solidarity economy* dengan tujuan kesejahteraan yang dilakukan dengan kerja sama.¹³

B. Analisis Kebijakan Ekonomi Syariah di Indonesia

Umer Chapra¹⁴ dalam bukunya menyebutkan ada lima dasar filosofis yang menjadi landasan dalam terbentuknya sistem ekonomi syariah yaitu: Pertama Tauhid yang meletakkan sesuatu dasar-dasar hubungan antara Allah selaku

penciptanya dengan manusia selaku makhluknya serta hubungan antara keduanya. Kedua Rububiyah yaitu dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya yang mengatur model dan bentuk dalam pembangunan sistem ekonomi syariah. Ketiga Khilafah merupakan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Keempat, Tazkiyah adalah misi utama utusan Allah yang bertujuan untuk menyucikan manusia dengan hubungannya bersama Allah, manusia dan alam lingkungan.¹⁵ Terakhir yakni falah adalah hasil dari tazkiyah itu sendiri yaitu kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat.

Pada dasarnya kebijakan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat, baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun regulasi yang mendukung operasional dalam sektor ekonomi syariah. Ada beberapa regulasi yang penting untuk membentuk kebijakan ekonomi syariah di Indonesia diantaranya:

¹² Windia, W. (2017). *Subak as a World Cultural Heritage: Its Existence and Challenges*.

¹³ Rahayu, S. (2019). "Adat dan Ekonomi Syariah: Harmoni antara Nilai Lokal dan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*.

¹⁴Umer M Chapra. *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Terj. Amdiar Amir, dkk) (Jakarta: Shari'ah Economics & Banking Institute, 2001), hal.60.

¹⁵Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2000, hal.2

1. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Dalam UU ini memuat landasan hukum yang jelas mengenai lembaga perbankan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan dasar hukum bagi pendirian bank syariah dan pengaturan operasionalnya. Dengan lahirnya UU ini akan menjadi peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Hal yang menjadi peluang diantaranya Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah.¹⁶ Penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi bank Syariah.¹⁷ Serta beberapa peraturan tertulis lainnya.

2. Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat

Lahirnya UU ini menjadi paradigma baru dalam transformasi zakat nasional di tanah air yang menggantikan Undang-undang pengelolaan Zakat No 38 Tahun

1999. Di Indonesia pada awalnya zakat belum dikelola tanpa keterlibatan negara dan dijalankan secara individu-tradisional yang ditopang oleh dua institusi keagamaan terpenting yaitu masjid dan pesantren.¹⁸

UU No.23 Tahun 2011 ini merupakan bentuk dari peng-qanun an syariah ke dalam hukum positif dan juga sebagai upaya dalam mencapai *good governance* dalam pengelolaan zakat nasional.

Maka dari itu UU ini mengatur lebih jelas mengenai pengelolaan zakat, infak dan sedekah sebagai instrumen yang penting dalam ekonomi syariah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat dan juga berperan sebagai badan amil zakat yang dapat berfungsi sebagai distribusi kekayaan. Dalam mencegah liberalisasi pengelolaan zakat dan menegakkan tata kelola zakat nasional kehadiran UU ini adalah hal yang sangat baik jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Integrasi zakat dalam kebijakan negara dalam memperbaiki kebijakan fiskal dan penganggulangan kemiskinan.

¹⁶ Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 5 Ayat 7

¹⁷Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 17 Ayat 2

¹⁸Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat & Development Report 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional* (Cet. II; Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011), h. 75.

3. Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

OJK merupakan salah satu hal yang mendukung berbagai peraturan dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia, seperti adanya regulasi yang terkait dengan pembentukan bank syariah, pada aktivitas syariah seperti pengelolaan wakaf, produk pembiayaan syariah, pembentukan asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Regulasi ini diharapkan perbankan syariah dapat bisa lebih kompetitif, inovatif, dan inklusif. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat industri halal nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

4. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal

Dalam UU ini mengatur hal-hal kewajiban produk yang beredar di Indonesia untuk memperoleh sertifikasi halal, serta UU ini mendukung pengembangan sektor industri halal dan ekonomi syariah secara keseluruhan. Menjamin ketersediaan produk halal, yang menetapkan bahan produk seperti bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan kimiawi, proses biologi atau proses

rekaya genetik. Selain itu pula menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.¹⁹

Undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan memberikan pengecualian bagi pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang diharamkan serta harus wajib mencantumkan secara tegas dan jelas keterangan produk yang mudah di lihat, dibaca dan tidak mudah terhapus, hal tersebut tidak terpisahkan dari produk. Oleh karena itu hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi syariah di Indonesia sebagian besar masih mengacu pada model universal yang sering kali kurang mempertimbangkan konteks lokal. Beberapa kebijakan, seperti regulasi perbankan syariah, lebih fokus pada aspek hukum dan keuangan tanpa eksplorasi mendalam terhadap penerapan nilai-nilai lokal.

C. Tantangan dalam Integrasi Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local indigenous atau local knowledge*) merupakan suatu daya

¹⁹ Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal

dan upaya oleh masyarakat dalam membentuk dan memberlakukan lingkungan alam dan sosial agar bermanfaat dengan sebesar-besarnya tanpa harus merusak ekosistem, keseimbangan dan kelestarian lingkungan serta keharmonisan dalam suatu tata kehidupan. Banyak istilah mengenai kearifan lokal secara mendalam yang berisi nilai luhur, penuh kearifan yang muncul di berbagai komunitas lokal sebagai salah satu upaya menyikapi bermacam masalah hidup.

Jika kita ibaratkan Islam sebagai sebuah bangunan keagamaan, maka ekonomi syari'ah dapat juga kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan ekonomi, karenanya untuk membentuk bangunan, kita membutuhkan adanya landasan, tiang dan atap, kita juga membutuhkan komitmen para pekerja untuk membentuk bangunan itu, dibutuhkan komitmen untuk membangun semua aspek yang terkait dengan bangunan itu, terkait dengan hal tersebut, dalam membangun sistem ekonomi syari'ah juga tidak dapat lepas dari unsur manusia secara keseluruhan, disamping kerangka dan landasannyapun harus kokoh, kuat dan jelas

Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi adalah:

1. Kurangnya pemahaman mengenai relevansi kearifan lokal dalam ekonomi syariah.

Minimnya penelitian dan dokumentasi, ada banyak nilai kearifan lokal yang diwariskan secara lisan dan belum terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, nilai-nilai ini sering kali kurang tereksplorasi dalam kajian formal, termasuk dalam konteks ekonomi syariah. Inisiatif pemerintah yang kurang terhadap akademisi dalam mendokumentasikan praktik dan nilai tradisional.²⁰

2. Dominasi Perspektif Global.

Kebijakan ekonomi syariah di Indonesia sering kali mengadopsi model dan praktik global yang dianggap lebih mapan, namun kurang mempertimbangkan konteks lokal. Hal ini menyebabkan nilai-nilai lokal kurang mendapat perhatian. Serta standar global yang lebih mapan dengan kebutuhan dalam menarik investasi dikalangan internasional. Hal tersebut mengakibatkan

²⁰ Geertz, C. (1963). *Agricultural Involvement: The Processes of Ecological Change in Indonesia*.

menghasilkan kebijakan yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang dimiliki masyarakat lokal.²¹

3. Tekanan Globalisasi dan modernisasi.

Globalisasi yang cenderung mengikis nilai-nilai tradisional termasuk masyarakat lokal dikarenakan dengan adanya adopsi nilai-nilai budaya asing dan modernisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal. Hal tersebut disebabkan karenan terjadinya urbanisasi, adanya perubahan gaya hidup, serta terjadinya penetrasi teknologi. Sehingga kearifan lokal mudah kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²²

4. Adanya Kesenjangan antara akademisi dan praktisi

Kurangnya dialog akademis dalam meneliti kearifan lokal dengan praktisi dalam membuat kebijakan dan membuat pelaku ekonomi syariah dan menghambat proses intergasi.

Hal yang menjadi penyebabnya dikarenakan adanya perbedaan fokus dan prioritas antara akademisi dan praktisi. Sehingga kebijakan yang dihasilkan pun tidak sesuai karena tidak berbasis pada kajian yang mendalam atau tidak aplikatif.²³

5. Kurangnya Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Saat ini belum adanya regulasi secara spesifik yang mendorong integrasi kearifan lokal dalam kebijakan ekonomi syariah. Hal tersebut disebabkan oleh pemerintah yang hanya fokus pada aspek teknis keuangan syariahnya saja sehingga, pada kenyataannya kearifan lokal hanya menjadi wacana saja tanpa adanya implementasi yang nyata.²⁴ Integrasi kearifan lokal yang dilakukan dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif dalam kebijakan ekonomi syariah dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan berkelanjutan.

²¹ Sofyan, S. (2021). "Integrasi Nilai Lokal dalam Ekonomi Syariah: Kajian Teoretis dan Empiris." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.

²² Rahayu, S. (2019). "Adat dan Ekonomi Syariah: Harmoni antara Nilai Lokal dan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*.

²³ Sofyan, S. (2021). "Integrasi Nilai Lokal dalam Ekonomi Syariah: Kajian Teoretis dan Empiris." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.

²⁴ Bank Indonesia (2022). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*.

D. Model Integrasi Kearifan Lokal

Model integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan ekonomi syariah dirancang untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal dalam sistem ekonomi berbasis syariah yang relevan dengan masyarakat Indonesia.

Model integrasi yang terdiri dari:

1. Identifikasi nilai-nilai lokal yang relevan. Model ini dilakukan melalui kajian partisipatif bersama tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan. Serta bertujuan untuk mengenali nilai-nilai kearifan lokal yang relevan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas sosial. Proses model integrasi ini melibatkan:
 - a. Kajian Etnografi merupakan studi mendalam terhadap budaya lokal untuk memahami nilai-nilai tradisional yang dapat diterapkan dalam konteks ekonomi.²⁵
 - b. Pendokumentasian Tradisi Lokal dengan menggunakan

wawancara, observasi, dan studi literatur untuk mencatat praktik ekonomi berbasis adat.²⁶

2. Harmonisasi nilai-nilai lokal dengan prinsip syariah. Model ini dilakukan dengan melibatkan ulama dan pakar ekonomi syariah. Nilai-nilai lokal dianalisis untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Proses ini melibatkan:
 - a. Kajian Syariah dengan memastikan nilai-nilai lokal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip maqashid syariah.²⁷
 - b. Diskusi dengan Ulama dan Akademisi yaitu melibatkan tokoh agama dan pakar ekonomi untuk menemukan titik temu antara nilai lokal dan syariah.²⁸
3. Penerapan kebijakan berbasis lokal. Model integrasi ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. Pada tahap ini juga

²⁵ Geertz, C. (1963). *Agricultural Involvement: The Processes of Ecological Change in Indonesia*.

²⁶ Ismail, Y. (2021). "Kearifan Lokal dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis

Syariah." *International Journal of Islamic Economics*.

²⁷ Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.

²⁸ Hasan, Z. (2020). "Kearifan Lokal dalam Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Sumatera Barat." *Jurnal Syariah*.

melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan relevansi dan penerimaan masyarakat. Langkah-langkahnya penerapan kebijakan dilakukan dengan:

- a. Musyawarah Publik: Mengundang masyarakat, tokoh adat, dan pelaku ekonomi untuk memberikan masukan.²⁹
- b. Pemetaan Konteks Lokal: Mengidentifikasi kebutuhan ekonomi daerah yang spesifik.³⁰

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran strategis dalam memperkaya dan memperkuat kebijakan penyusunan ekonomi syariah di Indonesia. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan prinsip adat yang bersendi syariat Islam sangat relevan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas sosial. Integrasi kearifan lokal ke dalam kebijakan ekonomi syariah tidak hanya meningkatkan penerimaan

masyarakat terhadap kebijakan tersebut, tetapi juga menjadikannya lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Ada berbagai tantangan dalam integrasi kearifan lokal, kurangnya pemahaman mengenai relevansi kearifan lokal dalam ekonomi syariah, Dominasi perspektif global, adanya tekanan globalisasi dan modernisasi, adanya kesenjangan antara akademisi dan praktisi, serta kurangnya dukungan kebijakan dan regulasi. Termasuk minimnya dokumentasi dan kesadaran akan relevansi nilai-nilai lokal, serta tekanan globalisasi yang dapat mengikis kearifan tradisional. Untuk itu, diperlukan pendekatan strategis yang melibatkan identifikasi, harmonisasi, dan penerapan nilai-nilai lokal dalam kebijakan ekonomi syariah. Model integrasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk mewujudkan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, upaya sistematis untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan ekonomi syariah dapat mendukung tercapainya

²⁹ Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001) Cet. Ke-1

³⁰ Rahayu, S. (2019). "Adat dan Ekonomi Syariah: Harmoni antara Nilai Lokal dan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*.

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, berbasis nilai-nilai lokal, dan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi pendekatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fahrudin, Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Masyarakat, (Bandung Humaniora, 2000)
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Yogyakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2000
- Aprilia Theresia, Krisnha S. Andini, dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Bank Indonesia, *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*, (2022)
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*.
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review*. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Geertz, C. *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*. (1963)
- Hasan, Z. "Kearifan Lokal dalam Ekonomi Syariah: Studi Kasus di Sumatera Barat." *Jurnal Syariah*. (2020)
- Hermanto Suaib, Suku Moi: Nilai-Nilai Kearifan Local dan Modal Social dalam Pemberdayaan Masyarakat, (An Image, 2017)
- Ismail, Y. "Kearifan Lokal dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah." *International Journal of Islamic Economics*. (2021)
- Karim, A. A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001) Cet. Ke-1(2018)
- Naim, M. "Adat Minangkabau dan Relevansinya dengan Prinsip Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*. (2020)
- Rahayu, S. "Adat dan Ekonomi Syariah: Harmoni antara Nilai Lokal dan Prinsip Syariah." *Jurnal Ekonomi Islam*. (2019)
- Sofyan, S. "Integrasi Nilai Lokal dalam Ekonomi Syariah: Kajian Teoretis dan Empiris." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. (2021)
- Tim Penulis IZDR 2010, *Indonesia Zakat & Development Report 2010*:

Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia; Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional (Cet. II; Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2011)

Umer M Chapra. *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (Terj. Amdiar Amir, dkk) (Jakarta: Shari'ah Economics & Banking Institute, 2001)

Walyoto, F. R. S. (2022). *Optimalisasi Hebitren dan Potensi UMKM Halal dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Dusun Hargosari Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo: Social Science Studies*, Vol. 2 No. 3 (2022): (issue-May),240257.

<https://profesionalmudacendekia.com/index.php/sss/article/view/398/195>

Windia, W. *Subak as a World Cultural Heritage: Its Existence and Challenges*. (2017)

Yafiz, V. C. M. (2022). *Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi*. Fair Value:

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 4 No. 11 (2022): Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 52875291.

<https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1804/1655>